

DAFTAR BACAAN

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250).

Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2014 Tentang
Pedoman Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101).

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pelaporan Gratifikasi.

Peraturan Kepala KPK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata
Cara Kerja KPK.

B. Buku

- Adami Chazawi (2020), *Hukum Pidana Korupsi DiIndonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo.
- Bagir Manan (2014), *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Kapita Selekta Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Buku Saku KPK RI (2021), “*Memahami Gratifikasi*”.
- C.F. Strong (1999), *Modern Political Constitution*. London: Sidgwick & Jackson.
- Chaerudin, (2008), Bandung, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PhSitorius. Editor Penerjemah JE. Sahetapy. 1995, Yogyakarta, *Hukum Pidana*, Liberty.
- David Daniel Paruntu (2014), *Tolak Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi*, Jakarta, Jurnal Hukum Lex Crimen.
- Deputi Bidang Pencegahan KPK RI (2021), *Pengantar Gratifikasi*, Jakarta: *Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan KPK*.
- Melik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih (2021). *Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. Jakarta, JPHK: Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan.
- Elwi Danil dan Iwan Kurniawan, “*Optimizing Confiscation of Assets in Accelerating The Eradication of Corruption*”, Hasanuddin Law Review, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017
- KPK, 2006, *Memahami untuk Membasmi Buku panduan untuk memahami Tindak Pidana Korupsi*.
- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Muliyono Andi, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan Pertama, 2017
- Muliyono Andi, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Yogyakarta: Genta Publishing,

Cetakan Pertama, 2017.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang Pelaporan Gratifikasi (“Peraturan KPK 2/2019”)

Peter Mahmud Marzuki (2012), *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana.

Puspita, Cecilia, *Tinjauan Tentang Pemberian Fasilitas Layanan Seksual Sebagai Bentuk Gratifikasi*, Jurnal Hukum, Vol321, No.4 Tahun 2012.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Tanti Yuniar, 2021, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung, PT. Agung Mulia.

Yasmirah Saragih, 2021, “*Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”.